**LAMPIRAN III.3**

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN**

**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN**

KABUPATEN : REMBANG

| **No.** | **URUSAN** | **No.** | **IKK** | **RUMUS/**  **PERHITUNGAN** | **Capaian** **KInerja** | **Keterangan** | **OPD PENGAMPU** | **DATA DUKUNG** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (4) | (5) | 6) | (8) | (9) |  |  |
|  | **URUSAN WAJIB** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pendidikan | 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD  -------------------------------- x 100 %  Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan | ..........% | Pembilang berasal dari Dinas pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak, ditandatangani oleh pejabat terkait * FC Daftar rincian jumlah anak usia 5-6 tahun, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per Kecamatan) |
|  |  | 2 | Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini | Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana  (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD  --------------------------------x 100 % Jumlah Pendidik PAUD | ..........% | Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah guru PAUD berijasah kualifikasi S1/D-IV * FC total jumlah guru Pendidikan PAUD |
|  |  | 3 | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi  -------------------------------- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini | ..........% | Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah Sekolah PAUD/TK ditandatangani oleh pejabat terkait * FC Daftar rincian jumlah anak usia 5-6 tahun PAUD/TK), ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per Kecamatan) |
|  |  | 4 | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis  --------------------------------x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas | ..........% | Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis, ditandatangani oleh pejabat terkait * FC Daftar rincian jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per Kecamatan |
|  |  | 5 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar  di sekolah dasar  ---------------------------------x 100 %  Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan | ..........% | Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A, ditandatangani oleh pejabat terkait * FC Daftar jumlah penduduk usia 7-12 tahun , ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per Kecamatan) |
|  |  | 6 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang  belajar di sekolah menengah pertama  ------------------ x 100 %  Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan | ..........% | Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B, ditandatangani oleh pejabat terkait * FC Daftar jumlah penduduk usia 13-15 tahun , ditandatangani oleh pejabat terkait (minimal per Kecamatan) |
|  |  | 7 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI  ----------------------------- x 100 %  Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan Jenjang SD/MI * FC Daftar rincian jumlah siswa pada tingkat dan Jenjang SD/MI (minimal per Kecamatan) |
|  |  | 8 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs  ------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan Jenjang SMP/MTs * FC Daftar rincian jumlah siswa pada tingkat dan Jenjang SMP/MTs |
|  |  | 9 | Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD  --------------------------------x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah guru SD/MI berijasah kualifikasi S1/D-IV dan Sertifikat Pendidik * FC total jumlah guru Pendidikan SD/MI |
|  |  | 10 | Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD  -------------------------------x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah guru SMP/MTS berijasah kualifikasi S1/D-IV dan Sertifikat Pendidik * FC total jumlah guru Pendidikan PAUD |
|  |  | 11 | Persentase SD dan SMP Terakreditasi | Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi  ------------------------------- x 100 %  Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP | .........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah Sekolah SD/SMP yang terakreditasi ditandatangani oleh pejabat terkait * FC Daftar rincian jumlah Sekolah SD/SMP (minimal per Kecamatan) |
|  |  | 12 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI  -------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SD/MI * FC Daftar rincian jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya |
|  |  | 13 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs  ---------------------------------x 100 %  Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs * FC Daftar rincian jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya |
|  |  | 14 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs  -------------------------------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs * FC Daftar rincian jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya |
|  |  | 15 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan  -------------------------------- x 100 %  Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan  pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan | DINPENDIKPORA | * FC Daftar rincian jumlah anak usia 7-18 thun yang belum menyelesaikan Pendidikan dsar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar kesetaraan * FC Daftar rincian jumlah anak usia 7-18 thun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah. |
| 2 | Kesehatan | 16 | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan  ------------------------------ x 100 %  Jumlah Penduduk di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * Daftar Daya Tampung Rumah Sakit Kabupaten * Fc Jumlah Penduduk Kab. Rembang |
|  |  | 17 | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi | Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi  ----------------------------- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * Daftar Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi * Daftar Jumlah seluruh rumah sakit di kabupaten |
|  |  | 18 | Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota | Jumlah Penduduk Kabupaten  -------------------------------------------Jumlah Tenaga Kesehatan | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * Fc Jumalah seluruh Penduduk Kabupaten * Fc Daftar Tenaga Kesehatan Seluruh Kabupaten |
|  |  | 19 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan  --------------- x 100 %  Jumlah ibu hamil di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah ibu hamil yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah ibu hamil wilayah kerja pd kurun waktu yang sama |
|  |  | 20 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan  --------------- x 100 %  Jumlah ibu bersalin di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinanan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas) * FC Daftar rincian jumlah ibu bersalinl wilayah kerja pd kurun waktu yang sama |
|  |  | 21 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan  sesuai standar  --------------- x 100 %  Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah bayi lahir yang mendapat pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah bayi lahir wilayah kerja pd kurun waktu yang sama |
|  |  | 22 | Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai  standar  --------------- x 100 %  Jumlah balita di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah balita yang mendapat pelayanan standar kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah balita wilayah kerja pd kurun waktu yang sama |
|  |  | 23 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar  --------------- x 100 %  Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan standar kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah anak usia pendidikn dasar wilayah kerja pd kurun waktu yang sama |
|  |  | 24 | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining  kesehatan sesuai standar  --------------- x 100 %  Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah orang usia 15-59 yang mendapat skrening standar kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten |
|  |  | 25 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar  --------------- x 100 %  Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah orang usia 60 tahun yang mendapat skrening standar kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah orang usia 60 tahun di kabupaten |
|  |  | 26 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan  kesehatan sesuai standar  --------------- x 100 %  Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan standar kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah penderita hipertensi di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas) |
|  |  | 27 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  --------------- x 100 %  Jumlah penderita DM di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah penderita DMyang mendapat pelayanan standar kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah penderita DM di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas) |
|  |  | 28 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  --------------- x 100 %  Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah penderita ODGJ yang mendapat pelayanan standar kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah penderita ODGJ di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas) |
|  |  | 29 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  --------------- x 100 %  Jumlah penderita TBC di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah penderita TBCyang mendapat pelayanan standar kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah penderita TBCi di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas) |
|  |  | 30 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan  pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar  --------------- x 100 %  Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan standar kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas)     - FC Daftar rincian jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu (Kecamatan, Puskesmas) |
|  |  | 31 | Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Jumlah Desa / Kelurahan UCI  ---------------------------------x 100 %  Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan | ..........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah Desa / kelurahan UCI minimal per Kecamatan     - FC Daftar rincian jumlah seluruh Desa/ Kelurahan (minimal per Kecamatan) |
|  |  | 32 | Presentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan | Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu  ---------------------------------x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama | .........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu     - FC Daftar rincian jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama |
|  |  | 33 | Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP  di satu wil. Kerja selama 1 thn  ---------------------------------x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama | .........% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - FC Daftar rincian jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 thn     - FC Daftar rincian jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama |
|  |  | 34 | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan  -----------------------------x 100.000  Jumlah Ibu Melahirkan | Jumlah | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan | DINKES | * + - Daftar Jumlah Kematian Ibu melahirkan     - Daftar jumlah ibu melahirkan |
| **3** | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | **35** | Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik | Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan  sedang)  --------------------------------x 100 % Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan) | DPU TARU | * FC Daftar rincian Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik * FC Daftar rincian Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut |
|  |  | 36 | Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi | Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi  -------------------------------x 100%  Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/  Direkonstruksi | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * FC Daftar rincian Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi * FC Daftar rincian Panjang seluruh jalan kabupaten yang hrus direhabilitasi/rekonstruksi |
|  |  | 37 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)  ------------------------------x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * FC Daftar rincian pemukiman rawan banjir yg terlindungi infrastruktur pengendalian banjir * FC Daftar rincian pemukiman rawan banjir |
|  |  | 38 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yangterlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)  -------------------------------x 100 %  Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di  WS Kewenangan Kabupaten (m) | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * FC Daftar rincian luas pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi yg terlindungi infrastruktur pengaman pantai * FC Daftar rincian Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yg menjadi kewenangan kabupaten |
|  |  | 39 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten | Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam  sebuah Kabupaten.  ----------------------------- x 100 %  Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut. | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * Daftar rincian Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi ditandatangani. * Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut ditandatangani. |
|  |  | 40 | Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk +  jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT +  jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD  ------------------------------- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ditandatangani * Jumlah rumah di Kabupaten Rembang ditandatangani |
|  |  | 41 | Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis  ----------------------------- x 100 %  Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di  wilayah Kabupaten | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * FC sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten * Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten |
|  |  | 42 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang  terjadi kecelakaan konstruksi  ------------------------------ x 100 %  Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi ditandatangani * Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya ditandatangani |
|  |  | 43 | Rumah Tangga Bersanitasi | Jumlah rumah tangga ber sanitasi  ------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * FC Daftar jumlah rumah tangga ber sanitasi (minimal per Kecamatan) * FC Daftar jumlah total rumah tangga (rincian per kecamatan) |
|  |  | 44 | Rumah tangga pengguna air bersih | Jumlah rumah tangga pengguna air bersih  ------------------------------- x 100 %  Jumlah seluruh rumah tangga | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * FC Daftar rincian jumlah rumah tangga pengguna air bersih (tidak hanya pelanggan PDAM) * FC Daftar rincian jumlah rumah tangga per kecamatan |
|  |  | 45 | Kawasan Kumuh | Luas Kawasan Kumuh  ---------------------------------------------------- x 100 %  Luas Wilayah | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * FC Daftar Luas kawasan kumuh * FC Daftar luas wilayah |
|  |  | 46 | Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah | Luas ruang terbuka hijau  ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * FC Daftar Luas ruang terbuka hijau milik Pemda * FC Daftar Luas wilayah ber HPL/HGB |
|  |  | 47 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan  irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting  --------------------------------x 100 %  luas daerah irigasi kewenangan kabupaten | ................% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DPU TARU | * FC Daftar rincian Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik * FC Daftar rincian Luas irigasi kabupaten |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 48 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada  tahun n  ------------------------------- x 100 %  Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | DINPERKIM | * Rincian Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada * Rincian Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun |
| 49 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten | Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga  Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni  ------------------------------ x 100 %  Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program  Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima  Pelayanan | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | DINPERKIM | * FC Rincian Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni * Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan |
|  |  | 50 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang  ditangani (ha)  ------------------------------ x 100 %  Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | DINPERKIM | * FC Daftar rincian Luas lingkungan pemukiman kumuh * FC Daftar luas wilayah |
|  |  | 51 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Jumlah unit rumah kumuh  ------------------------------ x 100 %  Jumlah total unit rumah Kabupaten | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | DINPERKIM | * Jumlah unit rumah kumuh ditandatangani * Jumlah total unit rumah Kabupaten ditandatangani |
|  |  | 52 | Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU  ------------------------------ x 100 %  Jumlah unit rumah kabupaten | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | DINPERKIM | * FC daftar Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ditandatangani * FC daftar Jumlah unit rumah kabupaten ditandatangani |
|  |  | 53 | Rumah layak huni | Jumlah rumah layak huni  -------------------------------- x 100%  Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | DINPERKIM | * FC Daftar rumah layak huni * FC Daftar jumlah seluruh rumah di kabupaten |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 54 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah pengaduan yang ditangani  ------------------------------- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | SATPOL PP | * Fc rincian jumlah pengaduan yang ditangani * Fc jumlah pengaduan yang masuk |
|  |  | 55 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan  ------------------------------- x 100%  Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | SATPOL PP | * Rincian FC Perda/perkada yang memuat sanksi * FC Perda/perkada yang memuat sanksi (Cover, bagian Sanksi, tanda tangan) |
|  |  | 56 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jumlah | Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | BPBD |  |
|  |  | 57 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan  dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah | Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | BPBD |  |
|  |  | 58 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah | Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | BPBD |  |
|  |  | 59 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran danenyelamatan/ Perangkat Daerah  -------------------------------x 100 %  Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | BPBD |  |
|  |  | 60 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran |  | Dinas Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | SATPOL PP |  |
|  |  | 61 | Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS | Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS  ------------------------------ x 100 % Jumlah Personil Satpol PP | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | SATPOL PP | * Daftar Nama Satpol PP (PNS) tahun 2019 yg berkualitas PPNS * Daftar Nama seluruh Satpol PP (PNS) tahun 2019 |
| 6 | Sosial | 62 | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti  --------------------------------x 100 %  Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial | DINSOS PPKB | * FC Daftar jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial per kecamatan **yang tlh menerima jamsos** dalam satu tahun (dengan rincian PMKS) per kecamatan * FC Daftar jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensia lper kecamatan **yang seharusnya menerima** jaminan sosial dalam satu tahun |
|  |  | 63 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi  kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran  ------------------------------- x 100 %  Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial | DINSOS PPKB | * FC Daftar jumlah korban bencana alam per kecamatan **yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** * FC Daftar jumlah populasi korban bencana alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial |
|  |  | 64 | Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar  --------------------------------- x100%  Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial | DINSOS PPKB |  |
|  |  | 65 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut  usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga  -------------------------------x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial | DINSOS PPKB | * Daftar jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut   usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga   * Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga |
|  |  | 66 | Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan | Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial  dan atau relawan sosial yang ada  ------------------------------- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial | DINSOS PPKB | * Fc rincian jumlah pekerja social atau relawan social professional * Fc jumlah rincian jumlah penyandang disabilitas, ank terlantar, lanjut usia yang ahrus dibina |
| 7 | Tenaga Kerja | 67 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang  mengacu ke RTKD  ---------------------------------x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja | DPM PTSP NAKER | * Rincian Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang   mengacu ke RTKD   * Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten |
|  |  | 68 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi  -------------------------- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja | DPM PTSP NAKER | * FC rincian Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi * Fc rincian Jumlah tenaga kerja keseluruhan |
|  |  | 69 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)  -------------------------- x 100% Jumlah tenaga kerja | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja | DPM PTSP NAKER |  |
|  |  | 70 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak  -------------------------- x 100%  Jumlah Perusahaan | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja | DPM PTSP NAKER | * FC rincian Jumlah perusahaan yang menerapkan tat kelola kerja yang layak * Fc Jumlah perusahaan seluruhnya |
|  |  | 71 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan  ----------------------------- x 100%  Jumlah pencaker yang terdaftar | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja | DPM PTSP NAKER | * FC Daftar rincian jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2019 di kab/kota * FC Daftar rincian jumlah pencari kerja yang mendaftar tahun 2019 di kab/kota |
|  |  | 72 | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan  Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan  Industrial  ---------------------------- x 100% Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja | DPM PTSP NAKER | * FC rincian Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan   Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan   * Industrial * FC jumlah daftar perselisihan Hubungan industrial |
|  |  | 73 | Persentase instruktur bersertifikat kompetensi | Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi  ---------------------------- x 100% Jumlah Instruktur | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja | DPM PTSP NAKER | * FC rincian instruktur yang bersertifikat kompetensi * FC rincian jumlah seluruh indtruktur di kabupaten |
|  |  | 74 | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan  ---------------------------- x 100% Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja | DPM PTSP NAKER | * FC rincian Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan * FC rincian Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja |
| 8 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 75 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Jumlah ARG pada belanja langsung APBD  ---------------------------- x 100%  Jumlah seluruh belanja langsung APBD | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DINSOS PPKB |  |
|  |  | 76 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban  kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi  --------------------------- x 100%  Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DINSOS PPKB |  |
|  |  | 77 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan  --------------------------- x 100.000  Jumlah penduduk perempuan | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DINSOS PPKB |  |
|  |  | 78 | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yng terlayani  ---------------------------- x 100%  Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DINSOS PPKB |  |
|  |  | 79 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan  --------------------------- x 100 %  Jumlah angkatan kerja perempuan | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DINSOS PPKB |  |
| 9 | Pangan | 80 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Jumlah cadangan pangan  -------------------------- x 100% Jumlah kebutuhan pangan | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Ketahanan Pangan | DINTANPAN | * FC Daftar rincian Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) tahun 2019 di kab/kota * FC Daftar yang menunjukkan jumlah penduduk tahun 2019 di kab/kota |
|  |  | 81 | Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan |  |  | Dinas Ketahanan Pangan | DINTANPAN |  |
| 10 | Pertanahan | 82 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi  -------------------------- x 100%  seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan | DINPERKIM |  |
|  |  | 83 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum  -------------------------- x 100%  Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan | DINPERKIM |  |
|  |  | 84 | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. | Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi  -------------------------- x 100%  Luas izin lokasi yang diterbitkan | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan | DINPERKIM |  |
|  |  | 85 | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL);  -------------------------- x 100%  Jumlah penerima tanah obyek landreform | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan | DINPERKIM |  |
|  |  | 86 | Luas lahan bersertifikat | Luas lahan bersertifikat di suatu daerah  -------------------------- x 100 %  Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan | DINPERKIM | * FC rincian luas lahan bersertifikat * FC luas lahan seluruhnya yang seharusnya bersertifikat |
|  |  | 87 | Tersedianya tanah untuk masyarakat. | Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin  Membuka Tanah  -------------------------- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan | DINPERKIM |  |
|  |  | 88 | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani  -------------------------- x 100%  jumlah pengaduan sengketa tanah garapan | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan | DINPERKIM |  |
| 11 | Lingkungan Hidup | 89 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | DLH |  |
|  |  | 90 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten | Total Vol sampah yang dapat ditangani  -------------------------- x 100%  Total vol timbunan sampah Kabupaten | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Lingkungan Hidup | DLH |  |
|  |  | 91 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang  melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten  -------------------------- x 100%  Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Lingkungan Hidup | DLH | * FC Daftar rincian jumlah Volume sampah yang ditangani   (m3) rincian per kecamatan   * FC Daftar rincian jumlah Volume produksi sampah (m3) rincian per kecamatan |
| 12 | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | 92 | Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran | Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte  kelahiran  -------------------------- x 100%  Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | DINDUKCAPIL | * FC rincian jumlah penduduk usia 0-18 tahun tang memiliki akte kelahiran (per kecamatan) * FC rincian jumlah penduduk usia 0-18 tahun per kecamatan |
|  |  | 93 | Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik | Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki  KTP  -------------------------- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | DINDUKCAPIL | * FC Daftar rincian jumlah penduduk yang memiliki KTP rincian per Kecamatan * FC Daftar rincian jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah) rincian per Kecamatan |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 94 | Persentase pengentasan desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa  berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun  -------------------------- x 100%  Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DINPERMADES |  |
|  |  | 95 | Persentase peningkatan status desa mandiri | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun  -------------------------- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DINPERMADES |  |
|  |  | 96 | PKK aktif | Jumlah PKK aktif  -------------------------- x 100 % Jumlah PKK | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DINPERMADES | * FC Daftar jumlah PKK aktif per Kecamatan * FC Daftar rincian jumlah PKK per kecamatan |
|  |  | 97 | Posyandu | Jumlah Posyandu Aktif  --------------------------- x 100 %  Total Posyandu | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DINPERMADES | * FC Daftar jumlah Posyandu aktif per kecamatan * FC Daftar Total Posyandu per kecamatan |
| 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 98 | TFR (Angka Kelahiran Total) |  |  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DINSOS PPKB |  |
|  |  | 99 | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) |  |  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DINSOS PPKB |  |
|  |  | 100 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB Aktif Modern  -------------------------- x 100%  Jumlas Pasangan Usia Subur | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DINSOS PPKB |  |
|  |  | 101 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani  -------------------------- x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DINSOS PPKB |  |
| 15 | Perhubungan | 102 | Rasio konektivitas Kabupaten | Rasio konektvitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x  Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)   * IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) * IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut)   Keterangan:  IK1 (Angkutan Jalan)   * Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP * Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu   IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)   * Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil * Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu   Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :   * Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) * Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) * Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)   Bobot Trayek atau Lintas :   1. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 2. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 3. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 |  | Dinas Perhubungan | DINHUB |  |
|  |  | 103 | Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota | V/C Ratio di Jalan Kabupaten |  | Dinas Perhubungan | DINHUB |  |
| 16 | Komunikasi dan Informatika | 104 | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo  ----------------------------- x 100%  DINHUB Jumlah PD | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika | DINKOMINFO |  |
|  |  | 105 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi  ----------------------------- x 100%  Jumlah Layanan Publik | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika | DINKOMINFO |  |
|  |  | 106 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran  informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten  ------------------------------ x 100% Jumlah penduduk | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika | DINKOMINFO |  |
|  |  | 107 | Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government | Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government |  | Dinas Komunikasi dan Informatika | DINKOMINFO |  |
|  |  | 108 | Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi  ------------------------------ x 100% Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika | DINKOMINFO |  |
| 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 109 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan  RAT, volume usaha dan asset  ------------------------------ x 100%  Jumlah seluruh koperasi | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DININDAGKOP UKM |  |
|  |  | 110 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha  ------------------------------ x 100%  Jumlah usaha mikro keseluruhan | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DININDAGKOP UKM |  |
|  |  | 111 | Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha  ------------------------------ x 100% Jumlah usaha kecil keseluruhan | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DININDAGKOP UKM |  |
|  |  | 112 | Koperasi aktif | Jumlah Koperasi aktif  ------------------------------ x 100 %  Jumlah seluruh koperasi | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DININDAGKOP UKM | * FC Daftar jumlah koperasi aktif tahun 2019 di kab/kota rincian per Kecamatan * FC Daftar rincian jumlah seluruh koperasi di kab/kota rincian per Kecamatan |
| 18 | Penanaman Modal | 113 | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten  ------------------------------ x 100% Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Penanaman Modal | DPM PTSP NAKER | Daftar ijin dan realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh SKPD yg mengelola urusan penanaman modal PemKab/Kota pd tahun 2019 |
| 19 | Kepemudaan dan Olahraga | 114 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten  ------------------------------ x 100%  Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga | DINPENDIKPORA |  |
|  |  | 115 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten  ------------------------------ x 100%  jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga | DINPENDIKPORA |  |
|  |  | 116 | Peningkatan prestasi olahraga | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional |  | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | DINPENDIKPORA |  |
|  |  | 117 | Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan | Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan  Pendidikan  ------------------------------- x 100% jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga | DINPENDIKPORA |  |
| 20 | Statistik | 118 | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun  perencanaan pembangunan daerah  ---------------------------- x 100% Jumlah PD | ...............% | Bappeda | DINKOMINFO |  |
|  |  | 119 | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah  ---------------------------- x 100% Jumlah PD | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Bappeda | DINKOMINFO |  |
| 21 | Persandian | 120 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi  ---------------------------- x 100%  Jumlah area penilaian | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kominfo | DINKOMINFO |  |
| 22 | Kebudayaan | 121 | Terlestarikannya Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan  -------------------------- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kebudayaan | DINBUDBAR |  |
|  |  | 122 | Penyelenggaraan festifal seni & budaya | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | Jumlah | Dinas Kebudayaan | DINBUDBAR | FC Daftar rincian jumlah penyelenggaraan seni dan budaya skala Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh pemda dan FC Cover beserta masing-masing laporan pelaksanaannya |
| 23 | Perpustakaan | 123 | Nilai Budaya Baca | Nilai budaya baca |  | Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan | DINAS ARPUS |  |
|  |  | 124 | Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan | x = a′+b′/a+b × 100%  x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks)  b' = koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan  dilestarikan (eks)  a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)  b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau  terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) |  | Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan | DINAS ARPUS |  |
|  |  | 125 | Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah | Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah  -------------------------------- x 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan | DINAS ARPUS | * FC Daftar Rincian yang menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah, ditandatangani oleh pejabat terkait * FC Daftar rincian yang menunjukkan koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan |
| 24 | Kearsipan | 126 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) | 1. T = (a + i + s + j)/4  T= tingkat ketersediaan arsip  a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip  i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana  bantu temu balik  j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN  melalui JIKN |  | Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan | DINAS ARPUS |  |
|  |  | 127 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | T = (m + b + g + a + c + i)/6  T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban  m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan  NSPK  b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK  g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip  perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK  a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK  c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK  I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK |  | Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan | DINAS ARPUS |  |
|  | **URUSAN PILIHAN** |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kelautan dan Perikanan | 128 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP) | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)  Kabupaten (sumber data: one data KKP) | Jumlah | Dinas Kelautan dan Perikanan | DINLUTKAN | * FC Daftar jumlah produksi ikan dalam satuan ton pada tahun 2018 * Target produksi ikan daerah tahun 2019 |
|  |  | 129 | Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional  ------------------------------ x 100 % Jumlah Tempat Pelelangan Ikan | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan | DINLUTKAN | FC daftar jumlah tempat pelelangan ikan yang beroperasional |
| 26 | Pariwisata | 130 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)  ------------------------------- x 100 %  Jumlah wisatawan tahun n-1 | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pariwisata | DINBUDPAR | FC daftar rincian jumlah wisatawan mancanegara |
|  |  | 131 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang | (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)  ------------------------------- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1 | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pariwisata | DINBUDPAR |  |
|  |  | 132 | Tingkat hunian akomodasi | Jumlah kamar yang terjual  -------------------------------- x 100% Jumlah kamar yang tersedia | ...............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pariwisata | DINBUDPAR |  |
|  |  | 133 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata  ------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB |  | Sumber data dari BPS atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku berdasar jenis lapangan usaha) | DINBUDPAR | FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB (yang terbit tahun 2018) sektor Pariwisata |
|  |  | 134 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata  ------------------------------------- x 100% Jumlah total PAD |  | BPS | DINBUDPAR |  |
| 27 | Pertanian | 135 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun  ------------------------------------- x 100% Luas Panen | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanian | DINTANPAN | FC Daftar rincian jumlah Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) tahun 2019 |
|  |  | 136 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019 | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian  ------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB | ..............% | Sumber data dari BPS atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku berdasar jenis lapangan usaha) | DINTANPAN | * FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB (terbit tahun 2019) sektor Pertanian * FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB (terbit tahun 2019) |
|  |  | 137 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah  kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)  ---------------------------- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular  tahun sebelumnya (t-1) | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanian | DINTANPAN |  |
| 28 | Energi Sumber DayaMineral | 138 | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota | Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin  -------------------------- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi | ..............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Energi Sumber DayaMineral |  |  |
| 29 | Perdagangan | 139 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019 | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan  --------------------------- x 100% Jumlah total PDRB | .............% | Sumber data dari BPS atau dari buku PDRB Sektor perdagangan (harga berlaku berdasar jenis lapangan usaha) | DININDAGKOP UKM | * FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB (terbit tahun 2019) sektor Perdagangan * FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB (terbit tahun 2019) |
|  |  | 140 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan  -------------------------- x 100%  Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perdagangan | DININDAGKOP UKM |  |
|  |  | 141 | Persentase kinerja realisasi pupuk | Realisasi  -------------------------- x 100% RDKK | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perdagangan | DININDAGKOP UKM |  |
|  |  | 142 | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan  ------------------------------- x 100%  jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perdagangan | DININDAGKOP UKM |  |
| 30 | Perindusrian | 143 | Pertambahan jumlah industri besar di Kabupaten | (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri  kecil dan menengah tahun n-1)  -------------------------- x 100% Jumlah industri besar tahun n-1 | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perindustrian | DININDAGKOP UKM |  |
|  |  | 144 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP |  |  | Dinas Perindusrian | DININDAGKOP UKM |  |
|  |  | 145 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan  -------------------------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perindustrian | DININDAGKOP UKM |  |
|  |  | 146 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan  -------------------------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perindustrian | DININDAGKOP UKM |  |
|  |  | 147 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil  pemantauan  -------------------------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan | .............% | Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perindustrian | DININDAGKOP UKM |  |
| 31 | Transmigrasi | 148 | Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya | Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi  pembangunannya dan pembinaannya | ..............% | Dinas Transmigrasi | BAG. KESRA | * FC Daftar Rincian jumlah Transmigran swakarsa * FC Daftar Rincian jumlah transmigran |
|  | URUSAN PENUNJANG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten | Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten |  | Sumber data dari Dinas Kominfo/ Perangkat Daerah yg menangani | DINKOMINFO | Print Out halaman muka dari aplikasi sistem informasi manajemen pemda |
|  |  | 2 | Penjabaran program RPJMD dalam RKPD | Penjabaran program RPJMD dalam RKPD  --------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan | ……….% | Sumber data Bappeda | BAPPEDA | * FC halam muka (cover), dan halaman yang menunjukan program RKPD tahun berkenaan dengan ditandatangani pejabat yang berwenang * FC hal muka (cover), dan halaman yang menunjuukan program RPJMD tahun berkenaan dengan ditandatangani pejabat yang berwenang |
|  |  | 3 | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan  -------------------------------- x 100 % Jumlah APBD | ……….% | Bagian Keuangan | BPPKAD |  |
|  |  | 4 | Rasio PAD | Jumlah PAD  ------------------------------- x 100% Jumlah PDRB non migas | ……….% | Bagian Keuangan | BPPKAD |  |
|  |  | 5 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures  ------------------------------ x 100%  jumlah belanja APBD | ……….% | Bagian Keuangan | BPPKAD |  |
|  |  | 6 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3)  berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh  BPKP |  |  | INSPEKTORAT |  |
|  |  | 7 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan  Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP |  |  | INSPEKTORAT |  |
|  |  | 8 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan  dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n  ------------------------------- x 100%  jumlah kontrak keseluruhan tahun n | ……….% |  | BAG. PBJ |  |
|  |  | 9 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif  -------------------------------x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif | ……….% |  | BAG. PBJ |  |
|  |  | 10 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan  ---------------------------- x 100% Total belanja langsung |  |  | BAG. PBJ |  |
|  |  | 11 | Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)  -------------------------------- x 100%  Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) |  |  | BKD | * Fc Daftar pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) * Fc daftar Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) |
|  |  | 12 | Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi  ------------------------------- x 100%  Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) |  |  | BKD | FC daftar pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi |
|  |  | 13 | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi  -------------------------------- x 100% Total belanja APBD dikurangi satu |  |  | BPPKAD |  |
|  |  | 14 | Assets management | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak); |  |  | BPPKAD |  |
|  |  | 15 | Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Nilai Realisasi SiLPA  --------------------------------- x 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya |  |  | BPPKAD |  |
|  |  | 16 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda  --------------------------------- x 100%  Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda |  |  | DINKOMINFO |  |
|  |  | 17 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda  --------------------------------- x 100%  total jumlah dokumen yang telah dirinci |  |  | BPPKAD |  |
|  | URUSA PUM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Kegiatan pembinaan politik di daerah | Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik | Jumlah | Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat Daerah yg menangani | KESBANGPOL | FC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan politik daerah ditandatangani oleh pejabat terkait |
|  |  | 2 | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP | Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP | Jumlah | Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat Daerah yg menangani | KESBANGPOL | FC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Organisasi Kemasyarkatan dan Pemuda) yang ditandatangani oleh pejabat terkait |